

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGELOLA OBYEK WISATA  
PANTAI HARLEM DI KAMPUNG TABLASUPA  
OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN JAYAPURA**

**Mulyana**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Jl. Ir. Soekarno Km. 20, 45263, Indonesia  
Email: mulyana.bdg17@ipdn.ac.id

**Evan Stanley Siby**

Pemerintah Provinsi Papua  
Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua, Indonesia  
Email: Evanstanley14@gmail.com

**ABSTRACT**

*Harlem Beach is one of the tourist objects in Jayapura Regency which has the potential to improve the welfare of the people of Tablasupa Village. This study aims to determine an overview of the community empowerment efforts of Harlem Beach managers based on their potential. This research uses descriptive qualitative method with an inductive approach. The data collection techniques used by the author are unstructured interviews using outlines of the problem, observation, documentation and triangulation of data sources. Data analysis techniques using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. An interesting finding in this conclusion is that the empowerment of the community managing Harlem Beach tourism objects by the Jayapura Regency Culture and Tourism Office uses the AGIL concept by building facilities, providing skills training and carrying out promotions but is still constrained by issues of customary rights, limited facilities and infrastructure. The conclusion of this study is that the empowerment efforts carried out based on the AGIL concept are considered to be not optimal, because they are hampered by several factors such as lack of facilities, poor infrastructure, unclear customary rights, lack of capital, the absence of BUMKAM and a lack of community mindset.*

**Keywords:** *empowerment, community, beach tourism*

**ABSTRAK**

Pantai Harlem merupakan salah satu obyek wisata di Kabupaten Jayapura yang sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Tablasupa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum upaya pemberdayaan masyarakat pengelola Pantai Harlem berdasarkan potensi yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara tidak berstruktur dengan menggunakan garis-garis besar permasalahan, observasi, dokumentasi dan triangulasi sumber data. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menarik dalam kesimpulan ini bahwa pemberdayaan masyarakat pengelola obyek wisata Pantai Harlem oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura menggunakan konsep AGIL dengan melakukan pembangunan sarana fasilitas, memberikan pelatihan ketrampilan serta melakukan promosi namun masih terkendala persoalan hak ulayat, keterbatasan sarana dan infrastruktur. Kesimpulan penelitian ini adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan berdasarkan konsep AGIL dinilai belum maksimal, karena terhambat beberapa faktor seperti kurangnya sarana, infrastruktur yang buruk, ketidakjelasan hak ulayat, kurangnya modal, belum adanya BUMKAM dan pola pikir masyarakat yang sangat kurang.

**Kata kunci:** Pemberdayaan, masyarakat, wisata pantai

**PENDAHULUAN**

Dalam pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisata menyatakan bahwa “salah satu prinsip penyelenggaraan

kepariwisataan adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat”. Selain itu pada pasal 28 huruf (i) tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah “meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki oleh masyarakat”.(Undang-Undang (UU) Tentang Kepariwisata, 2009). Berdasarkan pasal di atas maka sudah seharusnya pemerintah dalam penyelenggaraan kepariwisataan harus berorientasi pada pemberdayaan kepada masyarakat dengan potensi pariwisata yang ada di wilayah tersebut.

Salah satu daerah yang sering dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara adalah Provinsi Papua, seperti sama kita ketahui bahwa salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi adalah Raja Ampat, selain tempat tersebut ada berbagai potensi wisata lainnya yang sangat terkenal dan indah, salah satu diantaranya adalah Pantai Harlem yang terletak di Kampung Tablasupa Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.

Pantai Harlem memiliki garis pantai sepanjang 680 m dan Pantai Harlem juga menawarkan berbagai hal yang indah sehingga cocok bagi pecinta alam bawah laut, pasir putih pantai yang bersih, dan

kolam air tawar berwarna biru jernih yang berada di tengah daratan pantai. Obyek wisata ini dikelola oleh masyarakat Kampung Tablasupa yang berlokasi sekitar 500 meter dari lokasi obyek wisata Pantai Harlem. Sarana dan fasilitas yang ada di Pantai Harlem dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1**  
Sarana fasilitas yang ada di Pantai Harlem

No	Fasilitas	Jumlah (unit)	Harga (RP)
1	Gazebo / pondokan	8	500.000 per hari
2	Kamar mandi / WC	5	Gratis
3	Pondok wisata	2	1.000.000 per hari
4	Penginapan ( <i>homestay</i> )	6	350.000 per kamar/ per malam
5	Restoran / kantin	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura, 2019

Pada tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana fasilitas yang ada di Pantai Harlem hanya terfokus pada pondok-pondokan (*gazebo*) maupun penginapan bagi pengunjung untuk beristirahat. Kurangnya fasilitas yang memadai seperti layanan jaringan telekomunikasi yang tidak tersedia, sarana *wifi* spot, hingga aliran listrik yang belum ada, bahkan tidak adanya restoran ataupun kantin-kantin kecil yang menjual makanan atau minuman membuat pengunjung yang berkunjung ke Pantai Harlem harus

membawa makanan dan minuman sendiri yang dibeli dari Sentani ataupun yang dijual di kios-kios yang ada di dermaga Depapre, selain itu masyarakat menyewakan kamar di rumah mereka sebagai *homestay* bagi pengunjung yang berniat untuk menginap di Kampung Tablasupa dengan biaya yang terjangkau yaitu 350.000 per malam dengan fasilitas seperti; bed, lemari, dan meja di dalam kamar. Fasilitas tersebut dinilai cukup terjangkau bagi wisatawan.

Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat pengelola obyek wisata Pantai Harlem adalah kurangnya sarana dan fasilitas penunjang utama seperti aliran listrik dan jaringan telekomunikasi, kurangnya kualitas Sumber daya manusia yang mengelola Pantai Harlem, ketidakjelasan hak ulayat di obyek wisata dan belum adanya aturan khusus daerah yang mengatur tentang pengembangan obyek wisata Pantai Harlem agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di Kampung Tablasupa.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pengelola Pantai Harlem harus dilakukan bukan hanya oleh pemerintah daerah, swasta atau LSM, tetapi masyarakat itu juga sendiri karena masyarakat bukanlah obyek melainkan

subyek dari pemberdayaan itu sendiri, agar masyarakat mampu mandiri dan sejahtera dengan potensi pariwisata yang mereka miliki.

Penelitian mengenai obyek wisata pantai telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Beberapa diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Citra pada tahun 2017 dimana peneliti memfokuskan penelitian pada strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekowisata wilayah pesisir pantai dengan lokus di Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan analisis SWOT dan memperoleh kesimpulan dimana strategi pengembangan sumber daya pesisir untuk pemberdayaan masyarakat pembudidayaan ikan, pelestarian terumbu karang, pelatihan peningkatan pelayanan wisata, penyediaan tempat pelelangan ikan, pengadaan modal dan kerjasama bagi usaha-usaha masyarakat dalam membuat kerajinan tangan, penegakan hukum atau awig-awig beserta sanksi, memberikan batasan masuknya produk perikanan dari luar daerah. (Citra, 2017, p. 1)

Penelitian kedua dilakukan oleh Pramusita dan Sarinastiti pada tahun 2018 dengan memfokuskan pada aspek sosial ekonomi masyarakat lokal pada pengelolaan desa wisata pantai Trisik

Kulonprogo. Teknik pengumpulan data dilakukan tidak hanya menggunakan wawancara dan observasi tetapi peneliti juga melakukan *Focus Group Discussion* kepada kelompok Karang Taruna kawasan Pantai Trisik. Peneliti menggunakan arahan pengembangan agrowisata di kawasan desa wisata pantai dengan berpedoman pada kebijakan pengembangan kawasan wisata yang memiliki prinsip *Sustainable Tourism Development*. Kesimpulannya, terdapat 2 daya tarik wisata pada kawasan wisata pantai Trisik Banaran yaitu daya tarik wisata utama dan pendukung. Aspek sosial, ekonomi dan budaya memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata pantai. (Pramusita & Sarinastiti, 2018, p. 1)

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Syarifudin yang memfokuskan pada pola partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar obyek wisata pantai Tirta Samudera Jepara. Penelitian dalam bentuk tesis ini menggunakan melakukan analisis dengan konsep yang disampaikan oleh Club Du Sahel dimana pola partisipasi terdiri dari 4 jenis bertingkat yaitu pasif, aktif, keterikatan dan permintaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan strategi pentahapan pada pemberdayaan dengan melakukan

tahap 1 yaitu arahan, tahap 2 ikatan kontrak, tahap yaitu usulan kegiatan. (Syarifudin, 2004, p. 1)

Merujuk pada tiga penelitian terdahulu di atas, maka peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki kebaruan dimana peneliti memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat pengelola obyek wisata pantai dengan melakukan analisis menggunakan konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latent Pattern Maintenance*) yang disampaikan oleh Talcott Parsons.

Peneliti merumuskan masalah dalam pemberdayaan masyarakat pengelola Pantai Harlem di Kampung Tablasupa, yaitu: Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pengelola obyek wisata Pantai Harlem di Kampung Tablasupa oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura?. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui gambaran umum upaya pemberdayaan masyarakat pengelola Pantai Harlem berdasarkan potensi yang dimiliki.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Parsons dalam Mardikanto (Mardikanto, Totok dan Soebiato, 2015, p.

200) berpendapat bahwa Pemberdayaan adalah:

Sebuah proses yang membuat setiap orang menjadi cakap untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dari kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Di Indonesia, istilah pemberdayaan sudah dikenal pada tahun 1990-an di banyak NGO, baru setelah konferensi Beijing 1995 pemerintah menggunakan istilah yang sama. Dalam perkembangannya istilah pemberdayaan telah menjadi wacana publik dan bahkan seringkali dijadikan kata kunci bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat, yaitu “pembangunan yang berpusat pada rakyat yang merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat berakar dari bawah” Goulet, dalam Alfitri (Alfitri, 2011, p. 21).

### **Konsep AGIL dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Talcott parsons dalam Wirawan (Wirawan, 2012, p. 52) mengenalkan teori AGIL untuk menjelaskan hierarki pengendalian sibernatika. Hierarki sibernatika dapat dicermati melalui energi dan integrasi, yang meliputi sistem

budaya, sistem sosial, sistem kepribadian dan sistem organisasi, subsistem dalam kesatuan holistik, tindakan individu dan tindakan sosial yang dapat diamati menekankan pada sistem dan kondisi energi”. Sedangkan dalam perkembangannya konsep pemberdayaan juga dirumuskan dalam teori sistem sosial yang dikembangkan oleh Parsons bersama rekan-rekannya dirumuskan dalam kerangka:

A-G-I-L (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latent Pattern Maintenance*) atau Adaptasi, Pencapaian tujuan, Integrasi, dan Pemeliharaan pola sebagai empat persyarat fungsional dalam semua sistem sosial.

*Adaptation* merupakan keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.

*Goal Attainment* merupakan persyaratan fungsional bahwa tindakan itu selalu diarahkan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial.

*Integration* merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antara para anggota dalam suatu sistem sosial.

*Latent Pattern Maintenance* menunjukkan pada berhentinya interaksi, baik itu letih maupun jenuh, serta tunduk pada sistem sosial.

Menurut Parsons dalam Wirawan (Wirawan, 2012, p. 53), ada empat syarat fungsional agar sistem sosial dalam proses

pemberdayaan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, empat syarat tersebut meliputi:

1. Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, jadi dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan pribadi. Adaptasi juga berarti masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi atau perkembangan zaman yang sedang terjadi saat ini. Dengan beradaptasi maka masyarakat mampu bersaing dan meningkatkan kompetensi yang juga akan meningkatkan pendapatan atau meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di era modern maka masyarakat harus meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya.

Peningkatan kualitas SDM juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah dengan keterampilan-keterampilan yang baru yang diberikan kepada masyarakat. Contoh konkrit dari adaptasi adalah masyarakat harus bisa menyesuaikan atau mampu mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di suatu daerah. Karena dengan bisa beradaptasi maka

pemberdayaan dapat dilakukan secara efektif.

2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

*Goal attainment refers to the need for all societies to set goals towards which social activity is directed. Procedures for establishing goals and deciding on priorities between goals are institutionalized in the form of political systems* Parsons dalam Wirawan (Wirawan, 2012, p. 52) yang berarti dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yaitu kesejahteraan dan kurangnya angka kemiskinan maka masyarakat harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk bisa mencapai tujuan dari pemberdayaan maka masyarakat harus membuang pikiran atau keinginan-keinginan individual. Jadi, untuk bisa mencapai kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat harus membuang ego dan pikiran-pikiran primitif atau tradisional dan membuka diri untuk menerima pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Contohnya, masyarakat yang bermukim di sekitar objek wisata harus memberikan obyek wisata tersebut dikembangkan oleh pemerintah, karena masyarakat sendiri yang akan menerima manfaat ketika banyak wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata tersebut akan

meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di sekitaran obyek wisata tersebut.

### 3. Integrasi (*Integration*)

Menurut Soekanto (Soekanto, 2012) mengungkapkan bahwa Integrasi adalah hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga harus berperan aktif, bukan hanya menunggu instruksi dan bergantung pada pemerintah. Karena konsep memberdayakan sendiri adalah mengubah pola pemikiran masyarakat yang selalu bergantung dan menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk kehidupannya menjadi lebih aktif dan inovasi untuk dapat mengatur kehidupannya dengan modal ketrampilan dan keahlian yang diberikan oleh pemerintah. Integrasi juga membuat masyarakat menjadi subyek dalam rencana dan pembangunan oleh pemerintah, bukannya menjadi obyek pembangunan dan pemberdayaan.

Contoh dari integrasi adalah kemauan dari masyarakat untuk membuka diri dan menerima pemerintah dengan kebijakan yang dibuat. Pemberdayaan tidak akan mencapai tujuan jika masyarakat hanya berdiam diri saja.

### 4. Pemeliharaan pola (*Laten Pattern Maintenance*)

Pemeliharaan pola berarti masyarakat harus melengkapi, memelihara dan

memperbaharui motivasi dirinya dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Kemauan untuk keluar dari belenggu kemiskinan atau motivasi dari pemerintah sangatlah diperlukan untuk meningkatkan gairah masyarakat. Pemberdayaan tidak akan berjalan dengan baik apabila usaha dari kegiatan pemberdayaan tersebut tidaklah ditanggapi dengan baik oleh masyarakat yang ada.

Contohnya, jika program pemberdayaan masyarakat yang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakat hanya menunggu pemerintah, tapi sebaliknya pemberdayaan akan cepat jika masyarakat juga mau berinovasi dan membuat suatu terobosan baru. Untuk mempertahankan hal tersebut maka dibutuhkan konsisten dan kemauan yang tinggi agar segala sesuatu yang telah dilaksanakan tidak membuat puas diri masyarakat namun bisa untuk ditingkatkan lagi. (Corder, 1992).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Desain yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari beberapa informan seperti Kepala Dinas, Kepala

Bidang, Sekretaris Distrik, Kepala Kampung, Ketua Komunitas pecinta alam, Pengelola, Wisatawan serta data primer dan sekunder yang penulis kumpulkan di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penulis menggunakan wawancara tak berstruktur yang hanya berdasarkan garis-garis besar permasalahan, observasi dan dokumentasi berupa dokumen-dokumen berbentuk tulisan seperti peraturan daerah, surat, arsip dan penulis juga mengambil gambar dalam bentuk foto sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian di lapangan serta melakukan triangulasi sumber untuk menguji hasil penelitian. Selanjutnya, penulis juga menggunakan teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan seperti yang dijelaskan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (Sugiyono, 2016, p. 132).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Pemberdayaan Masyarakat bagi Pengelola Obyek Wisata Pantai Harlem dengan Konsep AGIL**

Menurut Parsons dalam Wirawan (Wirawan, 2012, p. 53), ada empat syarat fungsional agar sistem sosial dalam proses pemberdayaan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, empat syarat

tersebut meliputi : (1) Adaptasi (*Adaptation*), (2) Pencapaian tujuan (*Goal Attainment*), (3) Integrasi (*Integration*), dan (4) Pemeliharaan pola (*Laten Pattern Maintenance*). Penulis sengaja memilih konsep AGIL dari teori-teori sistem sosial Talcott Parsons agar bisa menganalisa dan mengkaji permasalahan yang terjadi menyangkut pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya pengelola obyek wisata Pantai Harlem di Kampung Tablasupa agar dapat menemukan solusi dan pemecahannya.

### ***Adaptation***

*Adaptation* atau Adaptasi menunjuk pada keharusan kepada manusia sebagai makhluk sosial untuk menghadapi lingkungan dimana dia berada. Adaptasi ini menyangkut dua dimensi permasalahan. Pertama, harus ada penyesuaian dari sistem terhadap “kondisi tindakan”, yakni suatu tuntutan kenyataan yang keras dan tidak dapat diubah, yang datang dari lingkungan. Kedua, adanya transformasi aktif dari situasi sebagai “cara untuk memperoleh alat untuk mencapai tujuan” (Parsons dalam Wasistiono, 2007, p. 46) .

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr. Drs. Joko Sunaryo. M,Si selaku Kepala Dinas pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 pukul

09.30 WIT (Ruangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), mengatakan bahwa :

Kabupaten Jayapura merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki lebih dari 50 destinasi wisata yang tersebar hampir diseluruh distrik dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Jayapura pun beragam mulai dari peninggalan prasejarah, peninggalan PD II, hingga obyek wisata alam. Pemerintah kabupaten Jayapura lewat Dinas Kebudayaan dan pariwisata telah berupaya meningkatkan obyek-obyek wisata tersebut. Salah satu contoh adalah Pantai Harlem. Pantai Harlem dan beberapa pantai di pesisir Kabupaten Jayapura telah dibenahi dan diberikan bantuan kepada masyarakat yang mengelola obyek wisata tersebut berupa bantuan pondok wisata hingga pelatihan peningkatan ketrampilan bagi masyarakat di kampung dalam meningkatkan manajemen pengelolaan kepariwisataan dengan harapan masyarakat menjadi sejahtera.

Peran Pemerintah Kampung Tablasupa dalam menjaga dan mengembangkan obyek wisata Pantai Harlem juga di jelaskan oleh Ibu Salonika Kiswaitouw selaku Kepala Kampung Tablasupa ketika di wawancara penulis pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 pukul 14.00 WIT (Rumah Kepala Kampung Tablasupa), mengatakan bahwa: “Pemerintah Kampung Tablasupa

selama ini berperan dalam pengembangan Pantai Harlem dengan membentuk kelompok-kelompok usaha produksi masyarakat yang dapat dipasarkan kepada wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata tersebut”.

Pengamatan penulis saat turun ke lapangan atau ke Kampung Tablasupa sebagai lokasi obyek wisata Pantai Harlem. Penulis melihat bahwa memang benar bahwa masyarakat Kampung Tablasupa yang mengelola obyek wisata Pantai Harlem berdasar kearifan lokal yang ada. Selain itu penulis juga sempat mewawancarai salah seorang pengelola obyek wisata Pantai Harlem. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Demena selaku pengelola obyek wisata Pantai Harlem pada hari Rabu tanggal 8 Januari pukul 14.00 WIT (di Pantai Harlem), mengatakan bahwa:

Masyarakat Kampung Tablasupa yang mengelola Pantai Harlem sudah membuka diri untuk bagi siapapun terutama bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Harlem atau Kampung Tablasupa dengan menyediakan fasilitas seperti pondok wisata, gazebo dan juga rumah masyarakat kampung yang dijadikan sebagai penginapan atau *homestay* pengunjung yang mau menginap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Demas selaku Sekretaris Distrik Depapre pada hari Rabu tanggal 8

Januari 2020 pukul 10.00 WIT (di Ruang Sekretaris Distrik Depapre), mengatakan bahwa:

Pemerintah Distrik Depapre telah berupaya untuk mengembangkan obyek wisata yang berada di pesisir khususnya di wilayah Distrik Depapre namun masih terkendala dengan kewenangan Distrik yang hanya bersifat membina kampung-kampung dan membenahi administrasi desa atau kampung, namun dengan dijadikannya Distrik Depapre sebagai salah satu *pilot project* maka kedepannya kewenangan pemerintah distrik tidak lagi sebatas mengawasi, membina dan melaporkan namun ada kewenangan lain yang bisa dilaksanakan seperti penarikan retribusi jasa di obyek wisata.

Hasil pengamatan penulis ketika berada di Pantai Harlem dapat disimpulkan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Jayapura lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Distrik Depapre dan Pemerintah Kampung Tablasupa telah berupaya

mengembangkan potensi Pantai Harlem dengan memberikan bantuan pembangunan pondok wisata dan sarana penunjang lainnya, merencanakan pengembangan setiap potensi yang ada berdasarkan kearifan lokal masyarakat dan membentuk beberapa kelompok usaha masyarakat yang bisa menambah pendapatan bagi masyarakat selain mengelola obyek wisata. Peran aktif dari masyarakat Kampung Tablasupa sendiri juga sangat baik karena menyediakan beberapa fasilitas penunjang di obyek wisata seperti gazebo, toilet hingga memberikan kamar rumah pribadi untuk dijadikan sebagai kamar penginapan atau *homestay* bagi pengunjung yang hendak menginap. Berikut ini adalah hasil wawancara penulis tentang indikator adaptasi yang coba di rangkum pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
 Hasil Wawancara Berdasarkan Indikator Adaptasi

No	Informan	Pendapat Informan	Sub kesimpulan dari wawancara
1	Unsur Dinas	Adaptasi dilakukan dengan memberi bantuan fasilitas dan memberi pelatihan ketrampilan bagi masyarakat.	Penulis menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan berdasarkan indikator adaptasi selama ini hanya mengandalkan bantuan fasilitas yang diberikan kepada pengelola
2	Unsur Distrik	Adaptasi dilakukan dengan merencanakan pembangunan berbasis kearifan lokal	Pantai Harlem, memberikan pelatihan dan merencanakan pembangunan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan.
3	Unsur Masyarakat	Adaptasi dilakukan dengan menyediakan fasilitas kepada wisatawan yang berkunjung ke Pantai Harlem	

Sumber: Analisis Penulis, Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai upaya pemberdayaan kepada masyarakat pengelola Pantai Harlem pada Tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan berdasarkan indikator adaptasi selama ini hanya mengandalkan bantuan fasilitas yang diberikan kepada pengelola Pantai Harlem, memberikan pelatihan dan merencanakan pembangunan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Goal Attainment**

*Goal Attainment* atau Pencapaian Tujuan merupakan prasyarat fungsional yang muncul berdasarkan pandangan bahwa setiap tindakan itu diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu.

Dalam sistem yang diutamakan adalah tujuan bersama bukan tujuan pribadi individu (Parsons dalam Wasistiono, 2007, p. 46). Berdasarkan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian kepada masyarakat yang berada di Kampung Tablasupa dengan potensi Pantai Harlem yang dimiliki. Tujuan selanjutnya adalah mengembangkan potensi tersebut agar menarik minat wisatawan, investor dan meningkatkan pendapatan para pengelola obyek wisata Pantai Harlem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alfius Youwe, S. IP selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pukul 11.00

WIT (di Ruang Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata), mengatakan bahwa:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berupaya untuk meningkatkan obyek wisata yang ada dengan promosi yang terus dilakukan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak pernah menarik sepeser dari hasil keuntungan pengelolaan obyek wisata Pantai Harlem, selain itu Dinas telah berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan. Hal tersebut bertujuan supaya masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera.

Hasil wawancara penulis dengan Mama Demena selaku Pengelola Pantai Harlem pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 pukul 13.00 WIT di Pantai Harlem, mengatakan bahwa:

Pendapatan masyarakat Kampung Tablasupa khususnya yang mengelola Pantai Harlem hanya lewat pendapatan biaya sewa fasilitas penginapan dan gazebo serta sewa motor boat karena pengunjung yang datang berkunjung biasanya menelpon memesan speedboat sehari sebelum turun ke Kampung karena pengelola tidak mempunyai modal untuk membuka kios ataupun kantin, selain itu pendapatan pengelola juga dibagi kepada pemilik genset yang dipinjam pengelola sehingga

pendapatan pengelola ketika akhir pekan hanya mencapai Rp.800.000 saja dan ketika hari liburan hanya mencapai Rp.1.500.000 hingga Rp.2.000.000 saja dan masih belum cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau untuk biaya perawatan sarana yang ada.

Berdasarkan pengamatan penulis saat berada di lapangan, masyarakat Kampung Tablasupa hanya berorientasi pada pengelolaan gazebo, pondok wisata dan *homestay* saja. Di lokasi obyek wisata Pantai Harlem tidak terdapat kelompok usaha ekonomi kreatif lainnya yang bisa dijadikan sumber pendapatan lain bagi masyarakat seperti Kantin, outlet cinderamata ataupun restoran karena belum ada modal yang cukup bagi masyarakat sehingga Pendapatan dari pengelolaan obyek wisata Pantai Harlem tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, hasil keuntungan dari pengelolaan obyek wisata Pantai Harlem tidak ditarik oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura, baik itu retribusi ataupun pungutan lainnya karena obyek wisata Pantai Harlem dikelola oleh masyarakat sehingga yang menjadi prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah mengembangkan potensi Pantai Harlem, dan melakukan

promosi yang mampu menarik minat wisatawan dan investor. Berikut ini adalah hasil wawancara berdasarkan

indikator pencapaian tujuan yang coba di rangkum penulis pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3**

Hasil Wawancara berdasarkan Indikator Pencapaian Tujuan

No	Informan	Pendapat Informan	Sub kesimpulan dari hasil wawancara
1	Unsur Dinas	Memberikan pelatihan dan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Penulis menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan berdasarkan indikator pencapaian tujuan belum tercapai karena hasil pendapatan masyarakat belum mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
2	Unsur Masyarakat	Kurangnya modal dan pendapatan pengelola Pantai tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.	

Sumber: Hasil wawancara Penulis, Tahun 2020

Hasil wawancara berdasarkan indikator pencapaian tujuan dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat pengelola Pantai Harlem pada tabel 3 di atas, penulis menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan berdasarkan indikator pencapaian tujuan belum tercapai karena hasil pendapatan masyarakat belum mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

**Integration**

*Integration* atau integrasi merupakan prasyarat yang berhubungan dengan antar hubungan para anggota dalam sistem sosial. Supaya sistem sosial berfungsi secara efektif sebagai satu kesatuan, diperlukan solidaritas di

antara individu anggota kelompok. Solidaritas dan kerelaan saling berkorban merupakan ikatan emosional yang menjadi perekat bagi keutuhan sistem sosial sebagaimana dijelaskan Parsons dalam Wasistiono (Wasistiono, 2007, p. 46). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Demas. A. Worumi, S.STP selaku Sekretaris Distrik Depapre pada hari Rabu tanggal 8 Januari pukul 10.00 WIT (di Ruang Sekretaris Depapre), mengatakan bahwa

Pemerintah Distrik Depapre telah berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada di pesisir tanah merah, namun memang yang masih menjadi kendala adalah kewenangan Pemerintah Distrik Depapre yang hanya sebatas membina desa atau

kampung yang memiliki obyek wisata, selain itu memang kendala yang selalu terjadi antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola obyek wisata yang ada adalah mengenai persoalan hak ulayat masyarakat di tempat obyek wisata.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Dr. Drs. Joko Sunaryo, M.Si pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Pukul 10.00 WIT (Ruang Kepala Dinas), mengatakan bahwa “Pemerintah telah bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan Pantai Harlem dengan membangun pondok-pondok wisata yang bisa dikelola oleh masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri”.

Selain Pantai Harlem, terdapat Pantai Amay yang juga terletak di Kampung Tablasupa, yang lokasinya sama dengan Pantai Harlem. Jika dilihat dari kondisi penduduk yang ada di Kampung Tablasupa yang memiliki 234 kepala keluarga yang terdiri dari 675 laki-laki dan 495 perempuan membuat Kampung Tablasupa memiliki jumlah penduduk terbanyak di Distrik Depapre. pekerjaan masyarakat Kampung Tablasupa sangatlah beragam mulai dari petani, nelayan hingga PNS/TNI POLRI.

Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sangat menggantung harapan pada hasil laut, dan ada juga yang mengelola obyek wisata yang berada di sekitaran wilayah Kampung Tablasupa baik Pantai Harlem atau Pantai Amay.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis ketika berada di lokasi obyek wisata Pantai Amay dan Pantai Harlem terlihat sangat berbeda dalam pengelolaan Pantai Harlem dan Pantai Amay. Di Pantai Amay masyarakat yang mengelola obyek wisata tersebut menarik jasa dari sewa gazebo dan pondokan yang telah disepakati dengan pemerintah Kampung Tablasupa sehingga tidak memberatkan pengunjung yang menggunakan fasilitas tersebut. Namun beda halnya dengan masyarakat yang mengelola obyek wisata Pantai Harlem yang menaruh pungutan dari jasa sewa gazebo dan pondok wisata yang terlalu tinggi dan fasilitas yang diberikan tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan pengunjung. Perbedaan harga sewa fasilitas yang ada di obyek wisata Pantai Amay dan Pantai Harlem dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4.**

Harga sewa fasilitas obyek wisata Pantai Amay dan Pantai Harlem

No	Obyek wisata	Fasilitas	Harga
1	Pantai Amay	Gazebo	Rp .350,000 per-hari
		Pondok wisata	-
		Penginapan ( <i>homestay</i> )	-
		Toilet	Gratis
2	Pantai Harlem	Gazebo	Rp. 500,000 per-hari
		Pondok wisata	Rp.1,000,000 per-hari
		Penginapan ( <i>homestay</i> )	Rp.350,000 per-malam
		Toilet	Gratis

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa adanya perbedaan harga jasa sewa fasilitas yang ada di kedua obyek wisata di Kampung Tablasupa mulai dari gazebo hingga penginapan, karena lokasi Pantai Amay yang dapat ditempuh dengan jalan darat maka di sekitaran obyek wisata tersebut belum ada pondok wisata atau penginapan atau kamar dari rumah masyarakat yang

dijadikan *homestay* bagi pengunjung yang akan menginap. Berbeda dengan harga sewa fasilitas yang ada di Pantai Amay, harga sewa di Pantai Harlem agak mahal. Hal ini dikarenakan beberapa fasilitas penunjang tersebut membutuhkan aliran listrik yang bersumber dari generator atau genset yang dipinjam pengelola dari masyarakat kampung yang mempunyai dan harus membayar biaya sewa genset tersebut. Oleh karena itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta Pemerintah Distrik Depapre selalu berupaya untuk mengatasi persoalan dari hal tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu Sophia Serontou selaku ketua komunitas Papua Diving Academy pada hari Sabtu tanggal 11 Januari pukul 10.30 WIT (di Kantor Papua Diving Academy), mengatakan bahwa:

Komunitas ini adalah komunitas pecinta alam yang turut menjaga kelestarian bawah laut yang ada di pesisir tanah merah dan juga menjaga obyek wisata pantai yang ada dengan turut mempromosikannya dan sasaran komunitas ini adalah anak muda yang ada di beberapa kampung di Distrik Depapre agar mereka diberikan keterampilan baru dan

ikut berpartisipasi dalam kegiatan positif.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis ketika berkunjung ke kantor Papua *Diving Academy*, penulis melihat bahwa potensi bawah laut yang ada di beberapa lokasi di pesisir tanah merah di manfaatkan dengan baik oleh komunitas ini, bukan hanya sekedar menikmati pemandangan bawah laut dan bukan sekedar hobi namun komunitas yang terbentuk pada tahun 2018 ini juga ikut menjaganya dan. Menurut ibu Sophia bahwa komunitas ini adalah sebagai wadah bagi masyarakat pecinta diving untuk turut melestarikan dan target dari komunitas ini adalah anak-anak muda agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk menjaga alam khususnya obyek-obyek wisata yang ada di sekitar Distrik Depapre.

Integrasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengembangkan Pantai Harlem sangat diperlukan karena selama ini masyarakat yang ada hanya mengelola Pantai Harlem dengan berorientasi pada keuntungan namun tidak memperhatikan kualitas pelayanan kepada wisatawan dan sarana fasilitas. Seharusnya dengan adanya keterlibatan pemerintah melalui

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata serta pemerintah Distrik Depapre atau pemerintah Kampung Tablasupa membuat motivasi masyarakat untuk mengembangkan obyek wisata Pantai Harlem lebih tinggi.

Berikut ini adalah rumusan penulis mengenai hasil wawancara pada indikator integrasi di Tabel 5 berikut.

**Tabel 5**  
Hasil Wawancara Berdasarkan Indikator Integrasi

No	Informan	Pendapat Informan	Sub Kesimpulan dari hasil wawancara
1	Unsur Dinas	Integrasi dilaksanakan dengan membangun pondok wisata untuk dikelola masyarakat. Integrasi belum dilaksanakan dengan maksimal karena terkendala kewenangan dan hak ulayat masyarakat pengelola.	Upaya pemberdayaan berdasarkan indikator integrasi sudah cukup baik dengan membangun fasilitas dan melibatkan anak muda dalam setiap kegiatan, namun terkendala kewenangan pemerintah distrik dan hak ulayat pengelola.
2	Unsur Distrik	Integrasi dilaksanakan dengan melibatkan anak muda dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.	Upaya pemberdayaan berdasarkan indikator integrasi sudah cukup baik dengan membangun fasilitas dan melibatkan anak muda dalam setiap kegiatan, namun terkendala kewenangan pemerintah distrik dan hak ulayat pengelola.
3	Unsur Komunitas	Integrasi dilaksanakan dengan melibatkan anak muda dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.	Upaya pemberdayaan berdasarkan indikator integrasi sudah cukup baik dengan membangun fasilitas dan melibatkan anak muda dalam setiap kegiatan, namun terkendala kewenangan pemerintah distrik dan hak ulayat pengelola.

Sumber: Hasil Wawancara Penulis, 2020

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai indikator Integrasi pada Tabel 5 di atas, penulis

menyimpulkan bahwa upaya Pemberdayaan yang dilaksanakan berdasarkan indikator integrasi dari Konsep AGIL sudah cukup baik dengan membangun fasilitas yang dapat dikelola untuk menambah pendapatan masyarakat, juga melibatkan anak-anak muda dalam setiap kegiatan yang bersifat positif juga menambah bekal ketrampilan anak-anak muda tersebut. Disamping itu adanya kendala dalam integrasi karena kewenangan yang belum sepenuhnya oleh Pemerintah Distrik Depapre untuk ikut mengembangkan setiap potensi pariwisata yang ada dan kendala lainnya yang menjadi masalah klasik dalam setiap upaya pemberdayaan dengan potensi pariwisata adalah hak ulayat yang belum jelas siapa yang pantas untuk mengelola obyek wisata tersebut.

#### ***Laten Pattern Maintenance***

*Laten Pattern Maintenance* atau pemeliharaan pola-pola yang menetap merupakan konsep yang menunjukkan adanya kematangan interaksi antar anggota sistem sosial, yang mungkin disebabkan karena kebosanan atau ketertekanan. Oleh karena itu harus dikembangkan pola interaksi lainnya yang menetap guna memulihkan

dorongan motivasional dan memperkuat pernyataan terhadap nilai-nilai yang dijadikan pegangan dalam suatu sistem sosial (Parsons, dalam Wasistiono; 2007:46). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfius Youwe, S. IP pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 pukul 11.00 WIT di Ruang Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, mengatakan bahwa :

Pemeliharaan pola yang ada di Pantai Harlem selama ini dilakukan hanya sebatas memberikan pelatihan dan ketrampilan bagi masyarakat untuk lebih berinovasi dalam mengelola Pantai Harlem dalam meningkatkan kesejahteraan, selain itu beberapa fasilitas pendukung yang dibangun di Pantai Harlem selama ini juga menjadi perhatian oleh Dinas.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Demena selaku pengelola obyek wisata yang ada di Pantai Harlem pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020, pukul 13.00 WIT (di Pantai Harlem), mengatakan bahwa:

Selama ini para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Harlem sudah berperilaku dengan sopan dan beretika serta kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan juga sudah baik namun pengunjung masih

mengeluhkan keterbatasan fasilitas penunjang yang ada dan harga dari sarana fasilitas yang terlalu mahal.

Salah satu pengunjung Pantai Harlem yaitu Josua yang diwawancarai penulis pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 pukul 15.30 WIT, ketika penulis berkunjung ke Pantai Harlem, mengatakan bahwa:

Pantai Harlem sudah sangat bagus namun manajemen dari pihak pengelola yang masih kurang yang membuat kadang pengunjung kurang menyukai sikap masyarakat yang mengelola, selain itu keterbatasan sarana seperti listrik, jaringan telekomunikasi dan kantin juga membuat pengunjung yang hendak berkunjung kesana harus menyiapkan bekal makanan dari rumah.

Dalam wawancara dengan Ibu Salonika Kiswaitouw pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, pukul 14.00 WIT juga mengatakan bahwa:

Masyarakat Kampung Tablasupa yang mengelola obyek wisata yang ada selama ini menyisihkan dari keuntungan pengelolaan obyek wisata Pantai Harlem untuk menambah biaya perawatan sarana fasilitas yang ada, selain itu memang

pemerintah Kampung Tablasupa juga mengharapkan adanya investor yang dapat membantu pengelolaan obyek wisata yang ada.

Perawatan fasilitas yang ada di Pantai Harlem sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat yang mengelola pantai karena ada enam marga yang mempunyai hak ulayat dan diberikan batasan-batasan pada wilayah pantai. Memang kedepannya harus ada beberapa fasilitas tambahan seperti aliran listrik, jaringan telekomunikasi dan kantin atau tempat makan karena hal tersebut menunjang minat pengunjung untuk datang ke Pantai Harlem karena wisatawan yang datang bisa mengeluarkan biaya yang murah dan mendapat akses komunikasi yang mudah ketika akan bermalam di Pantai Harlem. keterlibatan investor atau swasta memang sangat diharapkan, disamping memberi modal juga pihak tersebut mampu mengelola obyek wisata tersebut dengan manajemen yang benar. Penulis merumuskan hasil wawancara informan berdasarkan indikator pemeliharaan pola pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6**  
Hasil Wawancara Berdasarkan Indikator Pemeliharaan Pola

No	Informan	Pendapat informan	Sub Kesimpulan dari wawancara
1	Unsur Dinas	Memberi pelatihan ketrampilan bagi masyarakat agar meningkatkan kesejahteraan dan selalu memperhatikan fasilitas di Pantai Harlem	Upaya pemberdayaan berdasarkan indikator pemeliharaan pola dinilai sudah baik dengan memberi pelatihan ketrampilan kepada masyarakat, sikap yang baik dari masyarakat. Namun terkendala keterbatasan sarana dan manajemen pariwisata yang kurang oleh masyarakat.
2	Unsur Pemerintah Kampung	Masyarakat merawat fasilitas dengan hasil keuntungan pengelolaan Pantai Harlem, Kampung mengharapkan adanya investor.	
3	Unsur Masyarakat	Sikap masyarakat selama ini baik, sikap dan kesadaran wisatawan juga sangat baik namun masih mengeluhkan keterbatasan sarana yang ada.	
4	Unsur Wisatawan	Manajemen pengelola yang masih kurang dan sarana fasilitas penunjang yang sangat kurang membuat pengunjung jadi kurang suka.	

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Berdasarkan hasil analisis penulis pada indikator pemeliharaan pola di Tabel 6 di atas dapat disimpulkan bahwa Upaya pemberdayaan berdasarkan indikator pemeliharaan pola dinilai sudah baik dengan memberi pelatihan ketrampilan kepada masyarakat, sikap yang baik dari masyarakat. Namun terkendala

keterbatasan sarana dan manajemen pariwisata yang kurang oleh masyarakat.

Berikut ini merupakan rangkuman hasil wawancara yang dilakukan untuk mendapat data dan fakta yang di lapangan mengenai upaya pemberdayaan berdasarkan konsep AGIL bagi masyarakat pengelola obyek wisata Pantai Harlem pada Tabel 7 berikut.

**Tabel 7**

Hasil wawancara mengenai upaya pemberdayaan dengan Konsep AGIL

NO	Informan	Pendapat Informan	Kesimpulan
1	Kepala Dinas Joko Sunaryo (Senin, 13 Januari 2020 Ruang Kepala Dinas)	Upaya pemberdayaan dilakukan dengan cara mengembangkan setiap obyek wisata agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di obyek wisata	Upaya pemberdayaan berdasarkan Konsep AGIL dinilai kurang maksimal karena banyaknya sarana fasilitas pendukung di obyek wisata yang belum memadai, ditambah kondisi infrastruktur yang buruk, sikap masyarakat yang belum kooperatif, belum adanya modal dan belum adanya BUMKAM yang mampu mengelola potensi pariwisata atau menjadi wadah menampung hasil produksi usaha masyarakat.
2	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Alfius Youwe, S.IP (Senin, 30 Desember 2019 di Ruang Kepala Bidang)	Mengembangkan setiap obyek wisata dengan fasilitas dan memberikan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat	
3	Sekretaris Distrik Depapre Demas A. Worumi, S.STP (Rabu, 8 Januari 2020 di Ruang Sekretaris Distrik)	Pengembangan Pantai Harlem dengan <i>pilot project</i> berbasis kearifan lokal namun terkendala hak ulayat masyarakat	
4	Kepala Kampung Tablasupa Salonika Kiswaytouw (Rabu, 8 Januari 2020 di Rumah Kepala Kampung)	Membentuk kelompok usaha masyarakat agar meningkatkan pendapatan.	
5	Ketua Komunitas Papua Diving Academy Sophia Serontou (Sabtu, 11 Januari 2020 di Kantor Papua Diving Academy)	Ikut menjaga kelestarian Pantai, ikut mempromosikan potensi Pantai Harlem dan melibatkan anak muda dalam setiap kegiatan	
6	Pengelola Pantai Harlem mama Demena (Jumat, 10 Januari 2020 di Pantai Harlem)	Keterbatasan sarana penunjang, kondisi infrastruktur yang buruk membuat kurangnya minat pengunjung dan kurangnya pendapatan masyarakat	
7	Wisatawan lokal Joshua (Sabtu, 18 Januari 2020 di Pantai Harlem)	Sikap masyarakat yang kurang baik kepada pengunjung dan keterbatasan fasilitas penunjang di Pantai Harlem.	

Sumber: Hasil Wawancara Penulis dengan Narasumber, 2020

Kesimpulan dari hasil wawancara mengenai upaya pemberdayaan berdasarkan konsep AGIL kepada masyarakat pengelola Pantai Harlem dinilai belum maksimal karena banyaknya sarana fasilitas pendukung di obyek wisata yang belum memadai, ditambah kondisi infrastruktur yang buruk, sikap masyarakat yang belum kooperatif, belum adanya modal dan belum adanya BUMKAM yang mampu mengelola potensi pariwisata atau menjadi wadah menampung hasil

produksi usaha masyarakat. Berikut ini adalah ringkasan dari hasil analisis Triangulasi Data pada upaya pemberdayaan masyarakat pengelola Pantai Harlem berdasarkan konsep AGIL. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

**Tabel 8**

Ringkasan Hasil Analisis Triangulasi Data pada Upaya Pemberdayaan berdasarkan Konsep AGIL

Teknik Pengumpulan Data		Gambaran Ringkasan	Kesimpulan
No	Data		
1	Wawancara	Upaya pemberdayaan dinilai dilaksanakan dengan cukup baik dengan adanya bantuan fasilitas, pembentukan kelompok usaha masyarakat dan pelatihan kepada masyarakat.	upaya pemberdayaan yang dilaksanakan berdasarkan Konsep AGIL dinilai belum maksimal.
2	Observasi	Upaya pemberdayaan dinilai kurang maksimal dilaksanakan dengan baik karena sarana belum memadai, sikap masyarakat kurang dan belum adanya BUMKAM.	
3	Dokumentasi	Upaya pemberdayaan dinilai kurang maksimal karena hanya mengacu pada pengaturan umum penyelenggaraan kepariwisataan, kurangnya sarana, rusaknya infrastruktur	

Sumber: Analisis Penulis, 2020

Berdasarkan analisis penulis dengan teknik triangulasi data pada tabel 7 di atas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa upaya pemberdayaan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura kepada masyarakat Pengelola Pantai Harlem dinilai belum maksimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari proses penelitian mengenai pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat pengelola obyek wisata Pantai Harlem di Kampung Tablasupa oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura menurut teori AGIL oleh Parsons dalam Wirawan (Wirawan, 2012, p. 52), yaitu:

1. *Adaptation*

Penulis menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan berdasarkan indikator adaptasi selama ini hanya mengandalkan bantuan fasilitas yang diberikan kepada pengelola Pantai Harlem, memberikan pelatihan dan merencanakan pembangunan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. *Goal Attainment*

Penulis menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan berdasarkan indikator pencapaian tujuan belum tercapai karena hasil pendapatan masyarakat belum mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

3. *Integration*

Upaya pemberdayaan berdasarkan indikator integrasi

sudah cukup baik dengan membangun fasilitas dan melibatkan anak muda dalam setiap kegiatan, namun terkendala kewenangan pemerintah distrik dan hak ulayat pengelola.

4. *Laten Patern maintenance*

Upaya pemberdayaan berdasarkan indikator pemeliharaan pola dinilai sudah baik dengan memberi pelatihan ketrampilan kepada masyarakat, sikap yang baik dari masyarakat. Namun terkendala keterbatasan sarana dan manajemen pariwisata yang kurang oleh masyarakat.

Dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat pengelola obyek wisata Pantai Harlem berdasarkan konsep AGIL, juga terdapat faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pengelola obyek wisata Pantai Harlem di Kampung Tablasupa diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang belum optimal, kondisi infrastruktur yang buruk, ketidakjelasan hak ulayat pada lokasi obyek wisata, kurangnya kualitas SDM, belum adanya BUMKAM, dan partisipasi masyarakat yang kurang.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Distrik maupun Pemerintah Kampung Tablasupa yaitu meningkatkan sarana dan prasarana di Pantai Harlem, meningkatkan kualitas SDM, serta meningkatkan promosi Pantai Harlem.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mendiskusikan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki obyek yang sama. Penelitian terdahulu menyatakan hasil temuan dimana dalam rangka pengembangan obyek wisata Pantai Pangandaran, terdapat faktor pendorong yaitu daya tarik wisata dan sarana prasarana yang memadai. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia diikuti dengan kuantitasnya masih menjadi salah satu faktor internal penghambat, disamping masih terdapat kesadaran yang kurang dari pengusaha usaha jasa pariwisata. (Yuningsih, 2005, p. 1).

Penelitian lainnya menemukan bahwa masyarakat telah turut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Tabalansu, namun sifatnya masih terbatas, dimana komunikasi terlaksana karena adanya

inisiatif dari pemerintah. (Pujiningrum Palimbunga, 2018, p. 208). Sejalan dengan penelitian tersebut, Palimbunga menjelaskan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu dilaksanakan pada 3 tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. (Palimbunga, n.d., p. 1). Temuan lain bahwa obyek wisata Pantai Gemah berdampak positif pada ekonomi masyarakat. (Putra, n.d., p. 1)

Penelitian berikutnya menemukan konsep baru dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pantai yaitu melalui *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM). Dengan tujuan agar dapat menjamin pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir pantai. (Kristianty, 2016, p. 1). Pada penelitian berikutnya, menunjukkan bahwa perlu dilakukannya peningkatan pada pengembangan obyek wisata Pantai Balekambang. Pengembangan dapat dilakukan dengan cara melakukan pembenahan pada aspek akses jalan menuju lokasi, strategi publikasi dan dukungan masyarakat setempat. (Jefri A. Mateka, E Erlinda Indrayani, 2013, p. 1).

Temuan menarik pada penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat pengelola obyek wisata Pantai Harlem oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dengan menggunakan konsep AGIL dengan melakukan pembangunan sarana fasilitas, memberikan pelatihan ketrampilan serta melakukan promosi namun masih terkendala persoalan hak ulayat, keterbatasan sarana dan infrastruktur.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan berdasarkan konsep AGIL dinilai belum maksimal, karena terhambat beberapa faktor seperti kurangnya sarana, infrastruktur yang buruk, ketidakjelasan hak ulayat, kurangnya modal, belum adanya BUMKAM dan pola pikir masyarakat yang sangat kurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2011). *Community Development Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Citra, I. P. A. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.8484>
- Corder, A. (1992). *Teknik Manajemen Pemeliharaan*. Erlangga.
- Jefri A. Mateka, E Erlinda Indrayani, N. N. H. (2013). Obyek Wisata Pantai Balekambang Kabupaten Malang Jawa Timur. *Jurnal Mahasiswa Agribisnis Perikanan*, 1(1). <http://api.studentjournal.ub.ac.id/index.php/api/article/view/1>
- Kristianty, M. (2016). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 180, 752–760. <http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4264/1270>
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.
- Palimbunga, I. P. (n.d.). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam

- Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian Pariwisata Budaya. *Melanesia*, 15–32.  
<https://www.neliti.com/publications/236290/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pengembangan-pariwisata-di-kampung-wisata-ta>
- Pramusita, A., & Sarinastiti, E. N. (2018). Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Desa Wisata. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 1(2), 14–25.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jpt.35378>
- Pujiningrum Palimbunga, I. (2018). Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Tabalansu, Papua. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 05, 193.  
<https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p10>
- Undang-undang (UU) tentang Kepariwisataan, (2009).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>
- Putra, S. H. (n.d.). *Potensi Obyek Wusata Pantai Gemah dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar di Kabupaten Tulungagung*.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Angkasa Bandung.
- Syariefudin, K. (2004). *Pola Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Obyek Wisata Pantai Tirta Samudera Jepara* [Universitas Diponegoro].  
<http://eprints.undip.ac.id/12334/1/2004MAP3536.pdf>
- Wasistiono, S. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media.
- Wirawan. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Prenadamedia Group.
- Yuningsih, N. (2005). *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata*. Universitas Negeri Semarang.

